

PENELITIAN MADYA
BIDANG KELEMBAGAAN



LAPORAN

EVALUASI PENANGANAN KASUS NILAI UAS
MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA

(Studi Kasus: Mahasiswa Non Pendas Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1)

DRA. ISTIROKHIYAH, M.A.
DR. IR. AMALIA SAPRIATI, M.A.
HELMIATIN, S.E.

PUSAT PENELITIAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

2009

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS TERBUKA



**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS TERBUKA**

1. a. Judul Penelitian : Evaluasi Penanganan Kasus Nilai UAS Mahasiswa Universitas Terbuka (Studi Kasus Mahasiswa Non Pendas Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1)
- b. Bidang Penelitian : Kelembagaan
2. Peneliti
- Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Isti Rokhiyah, M.A.
b. NIP : 19620716 198801 2 001
c. Golongan.Kepangkatan : Penata /III/c
d. Jabatan Akademik : Lektor
e. Fakultas/Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Pusjian Anggota 1
- a. Nama Lengkap : DR. Ir. Amalia Sapriati, M.A.
b. NIP : 19600821 198601 2 001
c. Golongan.Kepangkatan : Pembina/IV/a
d. Jabatan Akademik : Lektor Kepala
e. Fakultas/Unit Kerja : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/Pusjian Anggota 2
- a. Nama Lengkap : Helmiatin, S.E
b. NIP : 19780426 200212 2 003
c. Golongan.Kepangkatan : Penata Muda/III/a
d. Jabatan Akademik : Asisten Ahli
e. Fakultas/Unit Kerja : Fakultas Ekonomi/Pusjian
3. Lama Penelitian : 12 (duabelas) Bulan
4. Biaya Penelitian : Rp.19.750.000,-
(Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5. Sumber Biaya : Universitas Terbuka

Mengetahui,
Dekan Fakultas FKIP

Drs. Rustam, M.Pd.
NIP.19650912 199010 1 001

Ketua Peneliti,

Dra. Isti Rokhiyah, M.A.
NIP. 19620716 198801 2 001

Menyetujui,
Ketua LPPM

Drs. Agus Joko Purwanto, M.Si
NIP. 19660508 199203 1 003

Menyetujui,
Kepala BAK PPI LPPM

Dra. Trini Prastati, M.Pd.
NIP: 19600917 198601 2 001



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Kelompok Jenis Kasus dan Cara Penyelesaiannya	18
Tabel 2 Ringkasan Isi SK Rektor No. 3901/H31/KEP/2009	20
Tabel 3 Persentase Kasus Nilai Masa Ujian 2006.1 – 2008.1	21
Tabel 4 Persentase Kasus Administrasi Masa Ujian 2006.1 – 2008.1	22
Tabel 5 Persentase Kasus Administrasi Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1	23
Tabel 6. Jumlah Kasus pada masa Ujian 2008.2 dan 2009.1	24
Tabel 7. Kelompok Jenis Kasus Ujian 2008.2 dan 2009.1	24
Tabel 8. Penyelesaian Kasus Sebelum Masa Registrasi Semester Berikut	25
Tabel 9. Persentase Kasus Berdasarkan Lama Tahun Ijasah	26
Tabel 10. Persentase Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin Mahasiswa Berkasus	27
Tabel 11. Persentase Kasus Berdasarkan Kategori Pendidikan Terakhir	28
Tabel 12. Daftar 10 MK dengan Persentase Kasus Tertinggi	29
Tabel 13. Daftar 10 Program Studi dengan Persentase Kasus Tertinggi	29

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Evaluasi Hasil Belajar	11
Gambar 2 Penganggung Jawab Pengelolaan Evaluasi Hasil Belajar	12

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Terbuka merupakan Perguruan Tinggi yang berbeda dengan Perguruan Tinggi lainnya karena memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini terletak pada pola pembelajaran yang diterapkan oleh UT yang dikenal dengan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ). Ciri utama yang terlihat dari pola ini yaitu terpisahnya mahasiswa dengan dosen, artinya mahasiswa diharuskan dapat belajar secara mandiri ataupun berkelompok melalui berbagai bahan ajar baik cetak maupun non-cetak. (Katalog UT, 2008)

Keunikan lainnya yaitu tidak ada batasan usia bagi mahasiswa untuk mendaftar di UT, serta tidak ada batas waktu menjadi mahasiswa. Artinya seseorang akan selalu terdaftar sebagai mahasiswa UT kapanpun waktu registrasi awal dilakukan. Bila seorang mahasiswa tidak melakukan aktivitas perkuliahan maka disebut mahasiswa pasif. Beberapa waktu lalu, UT mencoba untuk melakukan penyapaan kepada mereka agar kembali aktif menjadi mahasiswa. (Katalog UT, 2008)

Salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar mahasiswa selama mengikuti program. Untuk itu Universitas Terbuka (UT) melaksanakan ujian bagi mahasiswa di setiap akhir semester. Ujian adalah salah satu langkah untuk mengukur kompetensi mahasiswa. Ada dua macam ujian di Universitas Terbuka, yaitu ujian umum dengan tes objektif dan ujian dengan uraian.

Mahasiswa menjawab ujian dengan butir tes objektif pada lembar jawab ujian (LJU) dan ujian uraian di buku jawaban ujian (BJU). Semua LJU dari seluruh Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) UT di Indonesia dikirimkan ke Bidang Pengolahan Hasil Ujian (PHU) Pusat Pengujian, LPBAUSI UT, sedangkan BJU dikirim ke UPBJJ Sentra yang telah ditunjuk oleh UT Pusat. Di PHU, LJU diproses sehingga menghasilkan nilai pada setiap mata kuliah. Selanjutnya nilai setiap mata kuliah siap dikirim ke UPBJJ dan website UT untuk diumumkan ke mahasiswa.

Pada kenyataannya, tidak seluruh hasil ujian dapat diterbitkan nilainya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salah satu penyebabnya adalah disebabkan oleh adanya

kasus administrasi ujian. Bila kasusnya ringan tentunya dapat segera diatasi oleh staf pengujian, namun adakalanya membutuhkan waktu lama untuk dapat diselesaikan. Kasus-kasus tersebut dari semester ke semester mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah mahasiswa. Jenis kasus yang terjadi antara lain; mata kuliahnya tidak teregistrasi, tanda tangan daftar hadir mahasiswa tidak sama dengan yang tertera di LJU/BJU, tidak mencantumkan tanda tangan pada daftar hadir, NIM salah, tanggal lahir di LJU/BJU tidak sama dengan daftar pribadi mahasiswa, serta salah menghitamkan pada lembar LJU (Dokumen Pusmintas UT: JKOK UJ04, 2007). Berdasarkan kenyataan ini, maka perlu dilakukan evaluasi kasus tidak dapat diterbitkannya nilai hasil ujian mahasiswa dan menganalisis proses penyelesaian kasus sehingga nilai dapat diterbitkan.

Berdasarkan SK Rektor yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2008 yang bernomor 3901/H31/KEP/2008 tentang Penanganan Pelanggaran Tata Tertib Ujian Bagi Mahasiswa UT tercantum pada pernyataan butir ketiga bahwa UT tidak akan memproses hasil ujian apabila peserta ujian melakukan kesalahan yang salah satu diantaranya adalah kesalahan dalam mengisi identitas pada LJU atau BJU. Mengingat diperlukannya waktu yang cukup untuk proses sosialisasi kepada mahasiswa, maka SK ini baru dilaksanakan masa registrasi 2009.1. Adanya SK tersebut diharapkan akan memiliki dampak pada pelayanan dan upaya UT dalam meningkatkan kualitas dalam bidang pengujian mulai dari kualitas pelaksanaan ujian, pemrosesan hasil ujian, dan penerbitan hasil ujian. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan penelitian jenis kasus utama yang menyebabkan nilai mahasiswa tidak dapat diterbitkan sebelum diberlakukannya SK dan setelah diberlakukannya SK tersebut.

B. Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana persentase kelompok jenis kasus yang terjadi pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1?
2. Bagaimana penyelesaian kasus masa ujian 2008.2 dan 2009.1 tersebut sebelum masa registrasi berikutnya?
3. Bagaimana karakteristik mahasiswa yang berkasus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. mendeskripsikan karakteristik kasus penyebab tidak terbitnya nilai mahasiswa program Non-Pendas pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1,
2. menjelaskan persentase kasus yang dapat diselesaikan sebelum masa registrasi berikutnya yang masih dapat diselesaikan oleh bagian pemrosesan hasil ujian UT,
3. menjelaskan karakteristik mahasiswa yang berkasus pada UAS masa ujian 2008.2 dan 2009.1.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan untuk :

1. mengembangkan strategi yang tepat untuk menyelesaikan kasus nilai pada setiap semester dan meningkatkan kualitas pelayanan mahasiswa dalam hal pengumuman nilai ujian bagi Bidang Pengolahan Hasil Ujian, Pusat Pengujian LPBAUSI,
2. memikirkan upaya-upaya mengurangi jenis kasus nilai pada setiap semester bagi Pusat Pengujian LPBAUSI,
3. mensosialisasikan dan mendukung pelaksanaan pelayanan yang berkualitas dalam bidang pengujian bagi UPBJJ-UT,
4. meningkatkan kualitas sistem registrasi mahasiswa dan penyelenggaraan UAS bagi penentu kebijakan UT yang terkait,
5. meningkatkan pemahaman tentang prosedur dan pelaksanaan registrasi dan ujian bagi mahasiswa, dan
6. menjadikan bahan pemikiran dan penelitian selanjutnya bagi peneliti dan praktisi dalam bidang pengujian dan pendidikan jarak jauh.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai sebuah lembaga atau institusi pendidikan yang salah satu tujuan utamanya adalah memberikan mahasiswa bekal ilmu untuk mencapai kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, tentunya Universitas Terbuka menyelenggarakan ujian atau evaluasi bagi mahasiswanya setiap akhir semester. Dengan sistem belajar jarak jauh, UT perlu menerapkan sistem pengujian yang akurat dan terpercaya untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa. Untuk itu UT melakukan berbagai pembenahan sistem ujian dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi hasil belajar mahasiswa.

Agar pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan baik dan tertib, maka Pusat Sistem Jaminan Kualitas (Pusat Jaminan Kualitas) membuat sebuah pedoman atau petunjuk pelaksanaan evaluasi. Dalam hal ini merupakan pedoman atau acuan dalam pengelolaan evaluasi dimulai dari pengelolaan pengembangan bahan ujian dan instrumen alat uji kinerja, pengelolaan penyiapan dan penyimpanan alat evaluasi, dan pengelolaan hasil ujian yang berupa hasil ujian tertulis (*pencil dan paper test*) maupun ujian unjuk kerja (kinerja) (JKAK PU00, Pedoman Simintas).

Komponen penilaian atau evaluasi hasil belajar yang diberikan oleh UT meliputi Partisipasi dan Tugas Tutorial, ujian praktek atau praktikum, Ujian Akhir Semester (UAS), serta Tugas Akhir Program (TAP). Bentuk ujian di UT meliputi bentuk ujian objektif, uraian, unjuk kerja dan lisan.

A. Pendidikan Jarak Jauh

Sebelum pembahasan lebih lanjut tentang pendidikan jarak jauh, ada baiknya kita lihat sekilas sejarah pendidikan jarak jauh. Pada awalnya istilah pendidikan jarak jauh digunakan untuk menjelaskan sejumlah situasi belajar mengajar. Walaupun hal ini merupakan istilah baru pada masa itu, namun sebenarnya pendidikan jarak jauh telah dikenal lebih dari seratus tahun. Sistem pendidikan jarak jauh pertama yang digunakan di Eropa adalah korespondensi, yang ditandai dengan kurang optimalnya komunikasi antara pengajar dengan mahasiswa dan lambatnya umpan balik dari pengajar kepada mahasiswa

(Devi, 2006; Collin, 1996; dan Nipper, 1990). Sistem ini digunakan hingga pertengahan abad 20 sampai digunakannya sistem pembelajaran jarak jauh melalui radio dan televisi (Imel, 1996).

Sejalan dengan perubahan teknologi, pendidikan jarak jauh juga mengalami perubahan, sesuai dengan pergeseran variasi model yang mendukung proses belajar mengajar yang diselenggarakannya (Lockwood, 2001). Pendidikan jarak jauh tersebut makin berkembang tidak hanya didukung dengan model pembelajaran yang menggunakan variasi bahan ajar tercetak dan multimedia seperti video dan audio, namun juga didukung dengan berbagai model pembelajaran berbasis komputer (Taylor, 1995; 2001). Pada masa sekarang, pendidikan jarak jauh bukan lagi merupakan pendidikan yang menyelenggarakan berbagai kursus untuk memberikan sertifikat namun sudah merupakan universitas yang menawarkan program-program jenjang program sarjana atau bahkan program pascasarjana. Jumlah peserta yang mendaftarkan diri di pendidikan jarak jauh semakin banyak sehingga sejumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan jarak jauh telah menjadi suatu mega universitas (Daniel, 1996; Daniel & Mackintosh, 2003)

Seperti yang disampaikan dalam Suparman dan Zuhairi (2004), pengertian pendidikan jarak jauh digunakan secara luas berdasarkan sudut pandang setiap masing-masing. Namun demikian, berdasarkan pendapat Keegan (1986) yang disitir Suparman dan Zuhairi (2004), pendidikan jarak jauh memiliki enam ciri, yaitu ada keterpisahan antara pengajar dengan yang diajar, terdapat lembaga pendidikan yang mengelola proses pendidikan, mempercayakan penggunaan berbagai jenis media untuk menunjang pembelajaran, menggunakan sarana komunikasi dua arah, tersedia kesempatan pertemuan antara pengajar dengan yang diajar untuk keperluan pengajaran dan sosialisasi, dan terdapat praktek yang menunjukkan partisipasi dalam industrialisasi pendidikan. Dengan demikian Suparman dan Zuhairi (2004) mengajak untuk lebih memperhatikan yang dilakukan dalam sistem pendidikan jarak jauh daripada hanya sekedar mempersoalkan definisi tentang pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ditandai dengan jauhnya jarak antara yang belajar dengan pengajar, orang belajar dengan menggunakan berbagai media yang tersedia, orang belajar secara mandiri tanpa dibatasi ruang dan waktu, orang

dapat memilih program pendidikan yang jenis dan tujuan pendidikannya tidak berbeda dengan jenis dan tujuan pendidikan yang serupa pada program pendidikan biasa, sistem pendidikan jarak jauh merupakan arena penyebaran keahlian sistem instruksional, dan pengelolaan pendidikan jarak jauh menggunakan pendekatan pengelolaan industri. Memperhatikan hal tersebut, maka semua subunit yang tercakup pada lembaga pendidikan jarak jauh dalam kegiatannya memiliki ciri yang telah disebutkan.

Selanjut, istilah lain yang selalu mengiringi terminologi pendidikan jarak jauh adalah pendidikan terbuka. Suparman dan Zuhairi (2004) menunjukkan bahwa kata terbuka mengacu pada keterbukaan untuk menerima orang yang akan mengikuti program pendidikan tanpa mengenal batas usia, pekerjaan, tempat tinggal, dan jenis kelamin, bahkan dalam keadaan tertentu tanpa membedakan jenis tahun ijazah serta status hukum seseorang. Di samping itu, terbuka mengandung arti terbuka bagi orang yang akan mengikuti program pendidikan untuk memilih mata kuliah atau program sesuai minat dan kebutuhan serta terbuka untuk registrasi dan keluar dari proses pendidikan tanpa terikat waktu. Pada kegiatan sehari-hari, pendidikan terbuka dan jarak jauh sering digunakan secara bersamaan, di mana pelaksanaan pendidikan jarak jauh tersebut bersifat terbuka dan penyelenggaraan pendidikan terbuka dengan sistem jarak jauh.

B. Penilaian dan Ujian

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan penilaian itu? Banyak orang atau ahli yang mendefinisikan atau memberikan pengertian yang sama antara evaluasi dan penilaian serta pengukuran. Evaluasi merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan suatu program (Gronlund & Linn, 1990). Inti dari evaluasi adalah memberikan informasi bagi kepentingan pengambilan keputusan.

Pengukuran adalah proses mendapatkan penjelasan numerik atau kuantitas tentang tingkat karakteristik yang dimiliki individu (Gronlund dan Linn, 1990). Pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentuan nilai kuantitatif tersebut (Sudrajat dalam <http://www.wordpress.com>). Jadi pengukuran merupakan proses pemberian angka

atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seseorang telah mencapai karakteristik tertentu.

Penilaian tentunya berbeda dengan pengukuran. Penilaian merupakan metode dan proses untuk memperoleh dan menginterpretasi informasi tentang kemampuan, keterampilan, dan perilaku, menyusun informasi untuk menunjang suatu keputusan (Airasian, 1991; Dietel, dkk., 1991; *Asia Pasific Knowledge Base on Open Distance Learning*, 2004). Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar seseorang atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) seseorang. Penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif (pernyataan naratif dalam kata-kata) dan nilai kuantitatif (berupa angka).

Penilaian tersebut merupakan kegiatan inti yang sangat penting pada suatu perguruan tinggi (Bull, Conole, Davis & White, 2002). Kebijakan di suatu perguruan tinggi tentang kebijakan bagaimana melakukan penilaian termasuk misalnya penilaian secara online haruslah dideskripsikan secara jelas dan spesifik (Donan, 2007). Pendekatan yang digunakan dalam penilaian sangat terkait dengan budaya akademis suatu perguruan tinggi sehingga perubahan terhadap pendekatan penilaian sering sulit jika dilakukan tanpa mengubah asumsi dasar tentang belajar dan pembelajaran di perguruan tinggi yang tersebut (James, McInnis, & Devlin, 2002).

Konsep pelaksanaan belajar jarak jauh berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan penilaian. Ciri umum yang dijumpai pada pelaksanaan penilaian pada pendidikan jarak jauh adalah ada kecenderungan kurangnya kesempatan pengamatan pengajar atau dosen terhadap yang belajar atau mahasiswa, kurangnya pelaksanaan penilaian proses, kurangnya waktu dosen untuk memberikan penilaian dan memberi umpan balik, serta apabila penilaian telah menggunakan fasilitas komputer maka akan muncul permasalahan impersonaliti penilaian, terbatasnya dan bervariasinya kesempatan akses mahasiswa terhadap teknologi, munculnya permasalahan teknis, bervariasinya tingkat keterampilan mahasiswa, munculnya kecemasan mahasiswa terhadap kesulitan teknologi (*Assessing Students Online*, 1999; Juchnowski dan Atkins 1999).

Pelaksanaan penilaian haruslah mengikuti kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain untuk kekonsistenan pelaksanaan penilaian juga ditujukan untuk menunjukkan tentang adilnya perlakuan dalam penilaian. Kebijakan dan prosedur haruslah dirancang agar berlaku adil dan tidak ada celah bagi individu yang mencari kesempatan untuk berbuat curang dan mengambil keuntungan pribadi. Terkait dengan hal tersebut maka dipandang perlu untuk menjelaskan bagaimana proses pengolahan hasil ujian atau grading dilakukan. Jika peserta ujian mengetahui kebijakan dan prosedur yang berlaku secara transparan maka persepsi tentang akan adanya perlakuan istimewa atau tidak istimewa tidak akan muncul (University Teaching Services, The University of Manitoba, 1993).

Grading digunakan sebagai indikator kategori atau ranking (Edwards, Govindaraju, & Lai, 2005). Grading merupakan proses untuk menginterpretasikan hasil dan kinerja hasil belajar, yang memerlukan perhatian penuh dan kebijakan. Personel yang terlibat dalam proses haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang penilaian. Agar manajemen grading menjadi yang efektif maka perlu memperhatikan hal tertentu, antara lain prosedur pencatatan nilai serta sistem manajemen filing dan penyimpanan tugas mahasiswa (Learning and Teaching Centre, Macquarie University, 2008). Seperti telah disampaikan bahwa pelaksanaan grading haruslah mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Pada saat grading berlangsung janganlah terjadi adanya perubahan kebijakan dan prosedur yang dapat menyebabkan hasil penilaian tidak adil untuk satu individu dengan individu lainnya.

Perencanaan prosedur grading yang matang dan pengalaman yang cukup akan meminimalkan kesulitan yang muncul saat melakukan grading, walaupun sebenarnya permasalahan kadang-kadang tidak dapat dihindari (University Teaching Services, The University of Manitoba, 1993). Proses grading memerlukan persiapan, misalkan diperlukan adanya pemeriksaan terhadap hasil ujian apakah peserta ujian mencantumkan dua jawaban untuk soal yang dijawabnya, diperlukan melakukan penyiapan dan penyerahan dokumen untuk melakukan skoring bagi proses skoring manual, dan diperlukan adanya upaya untuk melakukan pengecekan reliabilitas (Roeber, 1996).

Penilaian dapat dilaksanakan melalui ujian atau proses penilaian kinerja. Pada pelaksanaan ujian, penyelenggara ujian harus menjelaskan hal-hal yang terkait ujian secara terinci dan jelas. Semua ketentuan dalam pelaksanaan ujian, seperti instruksi untuk peserta ujian, waktu ujian, penggunaan referensi dan kalkulator, penerangan, peralatan, tempat duduk peserta ujian, monitoring, ruang ujian yang diperlukan, hari ujian, harus benar-benar dijelaskan (Rudner, 1994). Informasi yang perlu disampaikan kepada peserta ujian antara lain adalah hak peserta ujian mendapatkan perangkat dan informasi tentang hasil ujian, kewajiban yang harus dipenuhi selama mengikuti ujian, kondisi-kondisi yang menyebabkan tidak diterbitkannya nilai, dan prosedur yang harus ditempuh peserta ujian jika masalah terkait pengumuman nilai (Joint Committee on Testing Practices, 2004).

Selanjutnya setelah ujian, hasil ujian setelah diproses juga harus dilaporkan dengan jelas dan terinci (Rudner, 1994). Penyelenggara ujian memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil ujian pada waktu yang sudah ditentukan dan dengan format yang dipahami oleh peserta ujian. (Joint Committee on Testing Practices, 2004). ETS atau Educational Testing Service di Amerika Serikat (2009) mengisyaratkan bahwa penyelenggara tes memiliki kewenangan untuk menghilangkan kesempatan seseorang mengikuti tes atau tidak menerbitkan hasil tes jika peserta tes tidak mengikuti peraturan atau ketentuan yang telah diinformasikan terkait aturan mengikuti tes.

Hasil penilaian dari ujian UAS mahasiswa di UT merupakan indikator keberhasilan belajar mahasiswa untuk mata kuliah tertentu. Oleh karena itu hasil belajar yang berupa nilai haruslah disampaikan kepada mahasiswa. Penyampaian atau pengumuman nilai UAS kepada mahasiswa adalah merupakan salah satu bentuk pelayanan UT kepada penggunanya, dalam hal ini mahasiswa. Hasil penilaian akan diumumkan apabila mahasiswa mengikuti ketentuan dengan benar sebagai peserta ujian dan hasil ujian yang dihasilkan layak untuk diproses.

C. Pedoman Penilaian Hasil Belajar di UT

Agar pelaksanaan penilaian hasil belajar berjalan dengan baik, dibuat pedoman evaluasi hasil belajar mahasiswa. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi

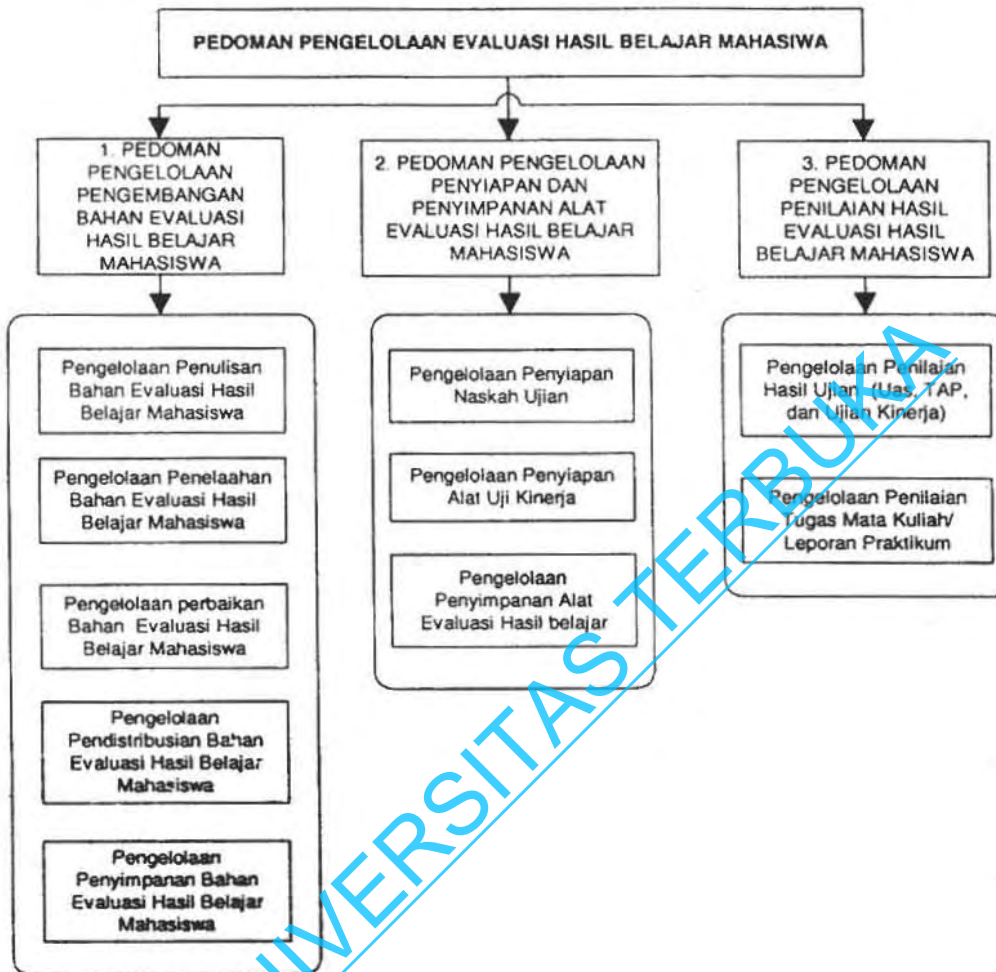
unit terkait dan staf dosen dalam mengelola pengembangan bahan evaluasi, penyiapan, dan penyimpanan alat evaluasi, serta penilaian hasil evaluasi belajar (EHB). Pedoman tersebut. Unit-unit yang terkait dalam kegiatan hasil belajar mahasiswa adalah Fakultas, Pusat Pengujian, dan UPBJJ. Ruang lingkup pedoman digambarkan dalam Gambar 1. berikut. Unit yang terkait dalam kegiatan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah Fakultas, Pusat Pengujian, Pusat Komputer (Puskom), dan Unit Pelayanan Jarak Jauh (UPBJJ-UT). Secara garis besar penanggung jawab dalam pengelolaan evaluasi hasil belajar mahasiswa digambarkan dalam Gambar 2 berikut.

Penilaian hasil belajar yang diterapkan di UT mencakup penilaian terhadap penilaian kinerja dan penilaian laporan praktek, laporan praktikum, dan tugas mata kuliah, penilaian terhadap partisipasi dalam tutorial, dan ujian. Ujian yang diselenggarakan mencakup ujian lisan, ujian menyimak, ujian tertulis, dan ujian berbasis computer. Bentuk soal ujian yang digunakan terdiri atas tes objektif dan uraian. Pengembangan soal ujian, pelaksanaan penilaian kinerja dan tutorial, serta penyelenggaraan ujian dan pemrosesan hasil ujian mengacu pada kebijakan dan prosedur yang tertuang pada buku pedoman simintas dan dokumen-dokumen simintas yang terstandar yang dikenal dengan dokumen ISO.

Secara teknis, pemeriksaan hasil ujian objektif dilakukan secara terkomputerisasi, sedangkan pemeriksaan hasil uraian dan laporan praktek/praktikum dan tugas mata kuliah dilakukan secara manual untuk mendapatkan skor. Setelah seluruh jawaban mahasiswa yang berbentuk objektif dimasukkan ke dalam komputer, proses skoring dimasukkan di dalam komputer, untuk kemudian dilakukan analisis butir soal. Sedangkan hasil pemeriksaan secara manual yang berupa skor, diketik (*key in*) ke dalam sistem database nilai ujian. Selanjutnya dilakukan proses *grading* untuk bentuk seluruh hasil EHB secara komputerisasi. Grade setiap mata kuliah telah ditentukan oleh dosen-dosen mata kuliah terkait di bawah koordinasi para Pembantu Dekan di fakultas masing-masing.

Gambar.1:

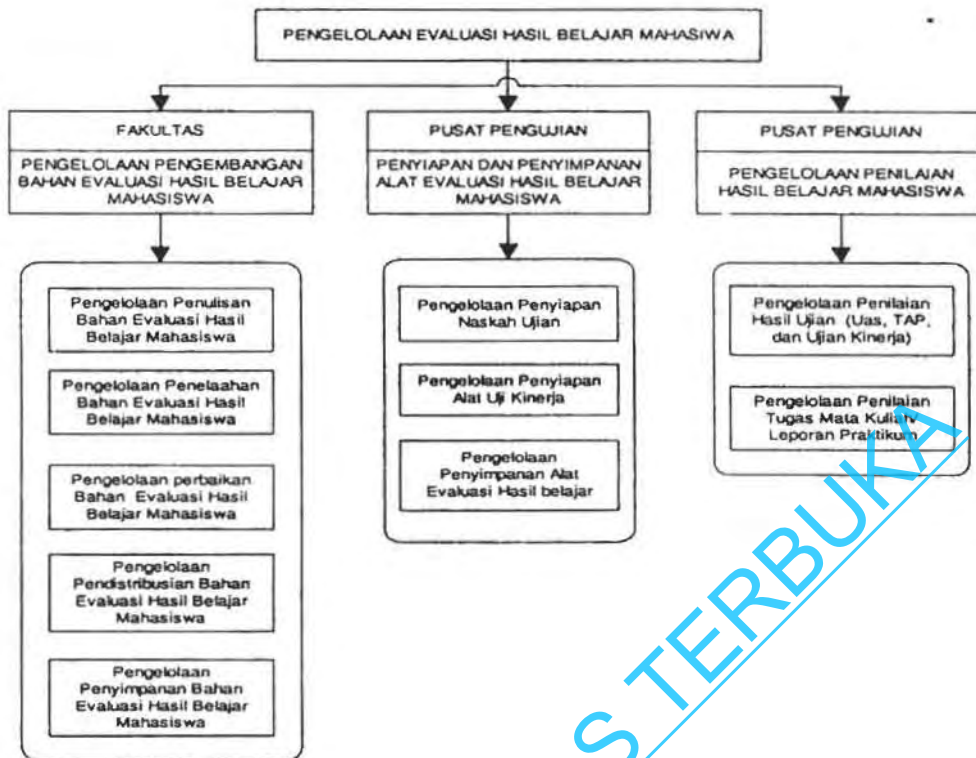
Ruang Lingkup Pedoman Pengelolaan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa



(Sumber: JKAK PU00, Pedoman Simintas, 2007)

Gambar 2

**PENANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN EVALUASI HASIL BELAJAR MAHASISWA**



(Sumber: JKAK PU00, Pedoman Simintias, 2007)

D. Kerangka Berpikir dan Definisi Operasional

Universitas Terbuka (UT), sebagai penyelenggara pendidikan tinggi terbuka yang jauh memberi kesempatan terbuka kepada siapapun yang memenuhi persyaratan yang ditentukan UT untuk memilih jenis program dan mata kuliah yang diminatinya. Konsekuensinya, mahasiswa yang bergabung dengan UT akan memiliki latar belakang yang sangat bervariasi. Di samping itu, adanya keterpisahan antara penyelenggara program berikut dosennya dengan peserta program yang belajar di dalamnya kadang-kadang dapat memicu munculnya ketidakselarasan antara yang direncanakan dengan kenyataan. Walaupun, UT telah merancang dan berupaya untuk menyediakan berbagai media dan fasilitas pendukung untuk segala aspek kegiatan akademik dan administrasi,

namun karena adanya variasi latar belakang geografi, ekonomi, dan keterampilan peserta pendidikan yang belajar di samping kadang-kadang terdapat keterbatasan sumber dan waktu pada UT sendiri maka kasus-kasus tertentu kadang-kadang muncul dan perlu penanganan khusus.

Ujian dan penilaian merupakan komponen penting pada lembaga pendidikan. Adanya jarak antara penyelenggaraan program, termasuk dosen dengan mahasiswa dapat mengarahkan pada kurangnya komunikasi sehingga dapat menyebabkan kurangnya informasi tentang ujian dan penilaian, kurangnya kesempatan pengamatan dan umpan balik untuk mahasiswa, dan kurangnya pelaksanaan penilaian proses. Proses penyelenggaraan ujian dan pengumuman hasil ujian, seperti halnya proses-proses lain di UT telah memiliki prosedur dan jadwal tertentu yang ketat. Semua kegiatan harus tepat waktu atau paling tidak dilakukan dalam waktu yang diperkirakan masih tidak mengganggu keberlangsungan proses berikut yang lainnya.

Pengisian data pribadi mahasiswa pada lembar jawaban mahasiswa memang sering dipandang oleh sebagian orang sebagai bagian yang tidak bersifat akademis. Namun adanya penggunaan sistem penilaian terkomputerisasi menuntut adanya kesesuaian antara data hasil pengisian oleh mahasiswa pada saat ujian dengan data yang dimiliki atau yang sudah tersimpan pada database UT. Adanya ketidaksesuaian antara data hasil pengisian dengan data yang sudah tersedia pada database UT dapat menghambat kelancaran prosesan hasil ujian. Ketidaksesuaian tersebut dapat saja diperbaiki satu per satu namun apabila jumlah banyak akan memerlukan waktu yang cukup lama yang akan mengganggu pada jadwal pengumuman hasil ujian. Di samping itu, penanganan satu per satu tersebut dikerjakan secara manual yang rentan terhadap kesalahan dan dapat membuka kesempatan untuk melakukan proses di luar prosedur yang berlaku, yang mungkin saja akan mengancam sistem keamanan yang sudah dibangun. Untuk mengantisipasi adanya pengisian yang salah, prosedur pengisian telah diinformasikan bukan saja kepada mahasiswa namun juga kepada pengurus dan pengelola di UPBJJ-UT. Penyampaian informasi tersebut bukan hanya dilakukan UT Pusat, namun juga gencar dilakukan oleh UPBJJ-UT dalam setiap kesempatan. Namun demikian, sehubungan dengan bervariasinya latar belakang mahasiswa UT dalam segala aspek, ditambah mungkin

kondisi yang dialami seseorang jika dalam keadaan sedang diuji, kesalahan pengisian data pribadi pada lembar jawaban ujian masih saja ditemukan. Keadaan ini menyebabkan dari semester ke semester masih saja ada kasus, di antaranya kasus administrasi yang terkait dengan kebenaran pengisian tersebut, dan kasus tersebut menyebabkan tidak diterbitkan atau tidak diumumkan hasil nilai ujian seseorang. Kasus tidak diterbitkannya nilai hasil ujian mahasiswa perlu diidentifikasi dan dievaluasi agar dapat dideskripsikan pola dan kecenderungannya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan selanjutnya agar kasus serupa tidak terjadi kembali atau minimal jumlah kasus yang muncul dari semester ke semester akan terus berkurang.

Definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah seperti berikut. Kasus ujian yang dimaksud adalah kasus administrasi yang muncul karena LJU ada tetapi tidak ada daftar hadir, tidak tanda tangan di daftar hadir, beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir, beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir, LJU tidak ada tetapi daftar hadir ada, tidak tandatangan di LJU/BJU (yang pada masa ujian 2009.1 hanya terdiri atas kasus beda administrasi karena beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir dan karena beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir. Ujian yang dimaksud adalah ujian tertulis UAS untuk program nonpendas pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1. Karakteristik kasus mengacu pada jenis kasus administrasi dengan rincian tersebut. Karakteristik mahasiswa yang dimaksud adalah karakteristik mahasiswa berdasarkan lama tahun dan tingkat jenjang ijazah, jenis kelamin, tempat tinggal, dan program/mata kuliah yang ditempuh.



UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Variabel dan Instrumen

No.	Varibel	Instrumen	Hasil
1.	Karakteristik kasus mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya: 1. LJU ada tetapi tidak ada daftar hadir 2. Tidak tanda tangan didaftar hadir 3. Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir 4. Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir 5. LJU tidak ada tetapi daftar hadir ada 6. Tidak tandatangan di LJU/BJU	Panduan observasi (Panduan analisis dokumen) kasus hasil ujian mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya	Data jenis-jenis kasus mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya
	(untuk MU: 20091: Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir dan Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir		
2.	Jumlah setiap jenis kasus mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya	Panduan observasi kasus mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan.	Data jenis-jenis kasus mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya yang dapat diselesaikan dan tidak dapat diselesaikan.
3	Karakteristik mahasiswa kasus admistrasi: 1.Lama tahun ijasah 2.Jenjang ijasah (latar belakang pendidikan) 3. Jenis kelamin		

B. Populasi dan Sampel

Populasi: dalam penelitian ini adalah seluruh kasus pada LJU/BJU mahasiswa peserta ujian yang nilainya tidak diterbitkan pada setiap semester.

Sampel : Kasus pada LJU/ BJU mahasiswa non pendas yang nilainya tidak diterbitkan pada semester 2008.2 dan 2009.1 Sampel ditentukan secara purposive (nonrandom sampling). Pemilihan dua masa ujian tersebut dimaksudkan untuk melihat bagaimana hasil ujian yang diterbitkan setelah kebijakan baru tentang penanganan kasus administrasi diterapkan. Dengan pemilihan sampel pada semester tersebut maka diharapkan dapat diketahui jumlah kasus yang dapat diselesaikan dan yang belum diselesaikan atau kasus yang tidak dilaporkan oleh mahasiswa untuk ditindaklanjuti di Pusat Pengujian.

C. Metode Pengumpulan Data

Secara umum penelitian ini memerlukan dua kelompok data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Pusat Pengujian, Koordinator Bidang Pengolahan Hasil Ujian (PHU), dan Ketua Satuan Tugas Penyelesaian Kasus Nilai, Pusat Pengujian, LPBAUSI UT. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap data kasus mahasiswa yang nilai UAS-nya tidak bisa keluar/ diproses dari dua masa uji tersebut.

D. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dari analisis data kualitatif diharapkan dapat diperoleh gambaran karakter kasus tidak keluarnya nilai. Dari analisis data kuantitatif, dapat diketahui besarnya persentase untuk setiap kasus yang terjadi.

Data primer dikumpulkan melalui hasil pengolahan data di Pusat Hasil Ujian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber dan digunakan untuk menunjang informasi yang dipergunakan dalam kajian ini.



UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melalui pengamatan dan analisis dokumen terhadap proses pengolahan hasil ujian dapat diketahui bahwa secara umum proses pengolahan hasil ujian seperti berikut. Hasil ujian yang tidak berkasus, nilainya nilai diterbitkan pada Daftar Nilai Ujian (DNU) sesuai waktu pengumuman hasil ujian. Sedangkan hasil ujian yang berkasus, nilainya akan terlambat diterbitkan atau bahkan sama sekali tidak dapat diterbitkan.

Kasus-kasus yang menjadi penyebab nilai terlambat atau tidak dapat diterbitkan adalah sbb.

1. Kode dan nama mata kuliah (yang diikuti ujiannya) tidak muncul pada DNU, yang penyebabnya adalah dapat dikarenakan oleh (1) hasil ujian salah identitas (mahasiswa salah menuliskan identitas pada hasil ujian), (2) Data Pribadi (DP) mahasiswa belum ada di dalam sistem, (3) hasil ujian tidak diterima di UT. Untuk penyelesaiannya mahasiswa yang memiliki kasus tersebut dapat menghubungi bagian Pelayanan Mahasiswa (Pelma) atau Pusat pengujian-LPBAUSI.
2. Kode dan nama mata kuliah (yang diikuti ujiannya) muncul pada DNU, tetapi nilai belum diterbitkan dengan keterangan :
 - a. Bertanda (-) ,
 - b. A (Kesalahan Administrasi),
 - c. P (Nilai praktek/ Praktikum/ PKM/ PKP belum ada),
 - d. R (Tidak teregistrasi), dan
 - e. S (Kurang uang SPP).

Untuk memudahkan penanganan dan penyelesaian kasus maka kasus-kasus ujian dikelompokkan menjadi 9 jenis kasus seperti yang tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kelompok Jenis Kasus dan Cara Penyelesaiannya

No	Jenis Kasus	Penjelasan	Penyelesaian
1	Matakuliah tidak ada di DNU	a. Karena status mahasiswa NON-AKTIF b. status DJ (lama ajar < 1 thn) c. status DB (latar belakang beda) d. untuk mtk PKP kemungkinan nilai laporan belum ada e. salah menuliskan nim pada LJU f. salah menuliskan kode matakuliah (double) g. sudah terjaring yudisium	a. Kelengkapan persyaratan registrasi awal, mahasiswa harus melampirkan seluruh persyaratan persyaratan sesuai cek list terlampir serta fotocopy SPP (TBS-UT). b. Harus mengaktifkan DP dengan melampirkan butki setor SPP (TBS-UT). c. cek ke Pusjian
2	Nilai mata kuliah pada DNU bertanda (-)	a. Sebelum masa 20091: Terdapat kesalahan pengisian identitas pada LJU/BJU diantaranya (kesalahan penulisan NIM, kesalahan penulisan kode matakuliah, kesalahan penulisan tanggal lahir). b. SPP belum di validasi oleh bagian registrasi UT c. Kelengkapan persyaratan registrasi awal (berkas yang dikembalikan) → status DS	a. Pengaduan nilai dengan membuat surat pernyataan (format terlampir). Bagi mahasiswa tanggal lahir pada SRS/DP salah, maka mahasiswa harus mengirimkan Perubahan Data Pribadi dan melampirkan Ijazah/akte kelahiran ke bagian registrasi. b. Mengirimkan/fax TBS ke bag registrasi UT PST. c. Mengirimkan kelengkapan registrasi awal ke UPBJJ
3	A, artinya kesalahan Administrasi	Macam-macam kasus A : Untuk kasus sebelum mu:20091 Kasus 1 → LJU ada tetapi tidak ada daftar hadir Kasus 2 → Tidak tanda tangan pada daftar hadir Kasus 3 → Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir Kasus 4 → Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir Kasus 5 → LJU tidak ada tetapi daftar hadir ada Kasus 6 → Tidak tandatangan di LJU/BJU Untuk kasus mulai MU: 20091 Kasus 3 → Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir Kasus 4 → Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir	Kasus 1 → perlu daftar hadir dari UPBJJ Kasus 2,4 dan 6 → perlu surat pernyataan dari pengawas ruang ujian dan disahkan kepala UPBJJ Kasus 3 → perlu contoh tanda tangan dan paraf dari mahasiswa Kasus 4 → perlu surat pernyataan dari mahasiswa tentang mata kuliah yang diikuti ujiannya Kasus 5 → berkoordinasi dengan UPBJJ untuk menelusuri hasil ujian yang Setelah masa ujian 2009.1 Hanya kasus ini saja yang harus membuat surat pernyataan atau kirim contoh tanda tangan dan paraf

No	Jenis Kasus	Penjelasan	Penyelesaian
4	P, artinya nilai praktek/Praktikum/PKM/ PKP belum ada	Komponen nilai matakuliah berpraktik/praktikum/PKM/ PKP tidak masuk	Berkoordinasi dengan UPBJJ, untuk mengirimkan nilai terkait.
5	R, artinya tidak teregistrasi	Mahasiswa tidak melakukan registrasi atau salah menuliskan kode mata kuliah pada LJU/BJU sehingga tidak sesuai dengan yang diregistrasikan	Pangaduan nilai dilampiri bukti pembayaran SPP (TBS-UT)
6	S, artinya kurang uang SPP	Pembayaran uang SPP kurang atau tidak jelas validasinya	Pangaduan nilai dilampiri bukti pembayaran SPP (TBS-UT)

Sumber: Bidang PHU-Pusat Pengujian, 2009

Terkait penanganan kasus administrasi tersebut, UT mulai masa ujian 2009.1 memberlakukan cara penanganan baru terhadap kasus ujian. Cara penanganan ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Rektor No. 3901/H31/KEP/2008 tentang Pelanggaran Tata Tertib Ujian yang selanjutnya berpengaruh terhadap proses hasil ujian. Perlakuan yang diberikan apabila ada kesalahan pengisian data pada saat ujian oleh mahasiswa yang menyebabkan munculnya kesalahan administrasi adalah dengan hasil ujian tidak akan diproses atau hasil ujian mendapat hukuman nilai E mata kuliah terkait. Kesalahan apa saja yang pada gilirannya akan menyebabkan terjadinya kasus administrasi tersebut tercantum pada Surat Keputusan (SK) Rektor dan secara ringkas tercantum pada Tabel 2

Tabel 2. Ringkasan Isi SK Rektor No. 3901/H31/KEP /2008

Jenis Pelanggaran	Perlakuan
Terlambat hadir lebih dari 30 menit Ke luar masuk ruang ujian pada saat ujian sedang berlangsung Mengikuti ujian dua mata kuliah atau lebih yang memiliki waktu ujian yang sama Menggunakan alat komunikasi dalam bentuk apapun pada saat ujian Merokok, makan, dan minum di ruang ujian pada saat ujian berlangsung Melakukan kesalahan dalam mengisi (menulis) identitas pada LJU/BJU Menggunakan identitas (NIM/nama/tanggal lahir) orang lain Tidak dapat menunjukkan Kartu Mahasiswa (atau kartu identitas lain yang sah bagi mahasiswa baru)	Hasil Ujian tidak akan diproses
Menggunakan kalkulator untuk mata ujian yang tidak diizinkan menggunakan kalkulator Membuka buku (bahan ajar/modul) untuk jenis ujian tutup buku Membawa LJU/BJU dan atau naskah ujian ke luar ruang ujian Menyalin soal dari naskah ujian Menyontek atau bekerja sama dalam mengerjakan ujian, baik yang dideteksi oleh petugas secara langsung maupun dalam mekanisme analisis pola jawaban yang dilakukan secara terkomputerisasi pada saat pemrosesan hasil ujian Tidak menandatangani LJU/BJU dan atau Daftar Hadir JOKI (hukum E seluruh mata kuliah diregistrasikan semester terkait)	Hasil Ujian Mendapat Hukuman Nilai E mata kuliah terkait

Sumber: Bidang PHU-Pusat Pengujian, 2009

Hasil ujicoba dengan mengambil Kasus pada LJU/ BJU mahasiswa yang nilainya tidak diterbitkan pada semester 2006.1-2008.1 menunjukkan bahwa karakteristik kasus LJU/BJU mahasiswa yang tidak dapat diterbitkan nilainya mengacu pada ketentuan pengelompokan kasus yang telah ditentukan (tercantum pada Tabel 3).

Tabel 3. Persentase Kasus Nilai Masa Ujian 2006.1 – 2008.1

Uraian	2006.1		2006.2		2007.1		2007.2		2008.1	
	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	Jml dan %	
Kasus Administrasi	899		763		1764		1008		1365	
Kasus 1 (UZ)	5	0,56	5	0,66	6	0,34	0	0,00	0	0,00
Kasus 2 (UU)	69	7,68	74	9,70	129	7,31	62	6,15	88	6,35
Kasus 3 (UV)	541	60,18	528	69,20	1292	73,24	854	84,72	1061	76,61
Kasus 4 (UW)	41	4,56	27	3,54	72	4,08	45	4,46	80	5,78
Kasus 5 (UY)	1	0,11	1	0,13	147	8,33	0	0,00	0	0,00
Kasus 6 (UX)	56	6,23	60	7,86	84	4,76	45	4,46	57	4,12
Kasus UT	186	20,69	68	8,91	34	1,93	2	0,20	79	5,70

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009)

Keterangan :

Kasus 1 (UZ): LJU/BJU ada, tetapi dinyatakan tidak hadir oleh pengawas

Kasus 2 (UU): Daftar hadir tidak ditanda tangani

Kasus 3 (UV): Tanda tangan berbeda antara LJU/BJU dan daftar hadir

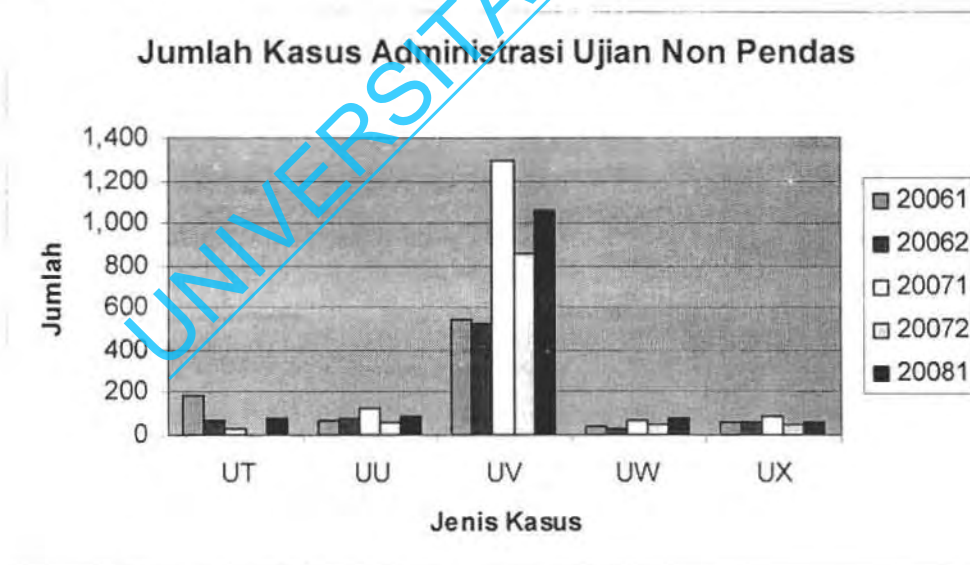
Kasus 4 (UW) :Mata kuliah berbeda antara di LJU/BJU dan daftar hadir

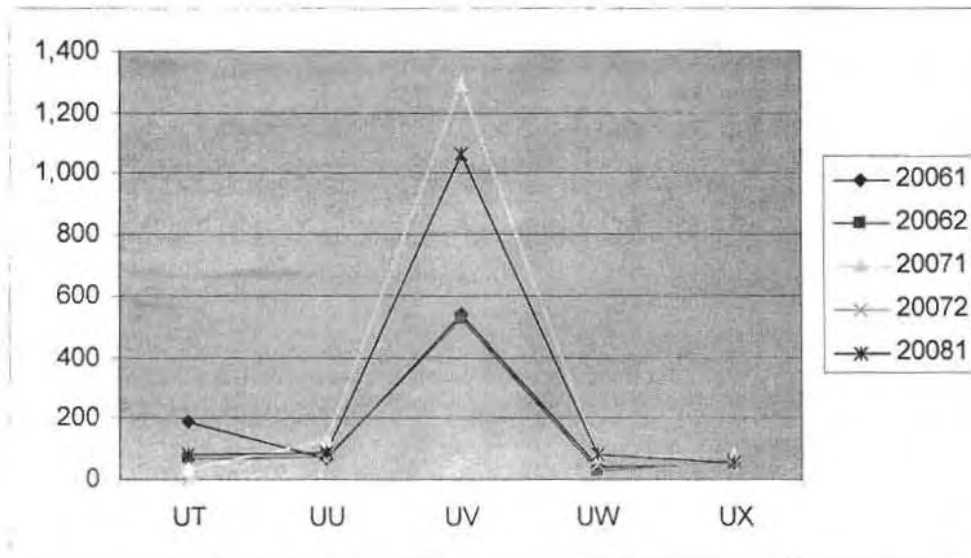
Kasus 5 (UY): Daftar hadir ada, tetapi LJU/BJU tidak ada

Kasus 6 (UX) :LJU/BJU tidak ditanda tangani

UT : Nama tidak ada di daftar hadir

Apabila digambarkan jenis kasus tersebut akan tampak seperti yang tercantum pada tabel dan grafik berikut.





Selanjutnya Tabel 4 berikut menjelaskan bagaimana persentase nilai yang tidak terbit karena kasus administrasi (terhadap total nilai yang seharusnya terbit) pada Masa Ujian 2006.1 – 2008.1. Data menunjukkan bahwa persentase nilai yang tidak terbit tersebut pada paling tinggi 0,84% terjadi pada masa ujian 2007.1,

Tabel 4. Persentase Kasus Administrasi Masa Ujian 2006.1 – 2008.1

Uraian	2006.1		2006.2		2007.1		2007.2		2008.1	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Registrasi	193,727		223,449		224,774		277,616		281,880	
Skor Nilai	178,452		205,749		210,211		256,307		261,276	
Kasus Administrasi	899	0,50	763	0,37	1764	0,84	1008	0,39	1365	0,52

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009)

Untuk masa ujian 2008.2 dan 2009.1 persentase kasus nilai yang tidak terbit karena kasus administrasi secara berturut-turut tercatat 0,49% dan 0,34% dari total skor nilai yang seharusnya diterbitkan, sedangkan sebagai gambaran persentase kasus nilai karena jenis kasus lainnya seperti kasus registrasi dan kasus SPP juga tercantum pada Tabel 5. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus administrasi tetap muncul pada masa ujian 2009.1 dengan persentase yang tidak terlalu berbeda, walupun tampak ada sedikit penurunan, dibandingkan dengan masa ujian 2008.2. Memperhatikan besarnya

persentase kasus dibandingkan jumlah mahasiswanya memang tampak kecil, namun sesuai dengan pendapat Bull, Conole, Davis & White (2002) yang menyatakan bahwa penilaian merupakan kegiatan inti yang sangat penting pada lembaga pendidikan maka sebesar apapun kasus tersebut perlu diperhatikan dan diminimalkan sampai pada akhirnya tidak kasus tidak akan muncul lagi sehingga semua hasil ujian mahasiswa dapat diterbitkan.

Tabel 5. Persentase Kasus Administrasi Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1

Uraian	Jumlah Kasus pada Masa Ujian		Pesentase Kasus Nilai dari Total Skor Nilai yang Harus Diterbitkan
	2008.2	2009.1	
Registrasi	328,311	342,980	
Skor Nilai	293,848	316,255	
Kasus Registrasi	2,401	2,729	2008.2 : 0,82% 2009.1 : 0,86%
Kasus SPP	10,207	8,579	2008.2: 3,47% 2009.1: 2,71%
Kasus Adminstrasi	1,448	1,079	2008.2: 0,49% 2009.1: 0,34 %

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009 dan Juli, 2009)

Apabila diteliti lebih jauh, Tabel 6 berikut menggambarkan rincian jumlah tiap jenis kasus pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1. Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa kasus administrasi karena teridentifikasinya Tanda tangan berbeda antara LJU/BJU dan daftar hadir tampaknya merupakan kasus terbesar baik pada dua masa ujian yang diteliti maupun 5 masa ujian pada penelitian pendahuluan (pada ujicoba penelitian), bahkan setelah dikeluarkannya SK Rektor yang baru. Dengan dikeluarkannya SK Rektor No, 3901/H31/KEP /2008, kategori jenis Kasus 1, 2, 5, 6 tidak diproses lagi, dengan demikian mahasiswa harus melakukan registrasi dan menempuh ujian untuk mata kuliah terkait pada masa registrasi berikutnya. Untuk kategori kasus administrasi yang tergolong jenis Kasus 3 dan 4 yaitu apabila Tanda tangan berbeda antara LJU/BJU dan daftar hadir dan adanya mata kuliah berbeda antara di LJU/BJU dan daftar hadir, LJU/BJU pada masa ujian 2009.1 ini masih diproses dan nilainya akan ditebitkan apabila kasusnya telah diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada masa ujian 2009.1 jumlah kasus dengan kategori kasus yang tidak diproses berjumlah 43 kasus (4,15% dari total kasus).

Tabel 6. Jumlah Kasus pada Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1

	Jumlah Kasus Nilai		Uraian
	2008.2	2009.1	
Kasus Administrasi	1,448	1,079	Total termasuk yang tidak diproses
Kasus 1 (UZ)	0	0	Berdasarkan SK Rektor, mulai 2009,1 tidak diproses
Kasus 2 (UU)	138	20	Berdasarkan SK Rektor, mulai 2009,1 tidak diproses
Kasus 3 (UV)	1,107	953 ^{*)}	Kasus yang masih diproses
Kasus 4 (UW)	71	83 ^{*)}	Kasus yang masih diproses
Kasus 5 (UY)	2	4	Berdasarkan SK Rektor, mulai 2009,1 tidak diproses
Kasus 6 (UX)	75	12	Berdasarkan SK Rektor, mulai 2009,1 tidak diproses
Kasus UT	55	7	Berdasarkan SK Rektor, mulai 2009,1 tidak diproses

^{*)} Jenis kasus yang masih tercantum pada SK Rektor yang berlaku, kasus lain tidak diproses
(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009 dan Juli, 2009)

Mahasiswa berkasus dapat menempuh ujian pada semester berikutnya, setelah selesai pemrosesan ujian. UT-Pusat mengirimkan surat kepada mahasiswa yang bersangkutan di samping juga mengirimkan data digital ke UPBJJ-UT terkait (informasi dari staf PSUTP). Diharapkan setelah menerima informasi, mahasiswa akan segera menghubungi UT dan melakukan penyelesaian kasusnya. Penelitian ini mengaji tentang berapa persen kasus nilai yang tidak terbit tersebut dapat diselesaikan sebelum penutupan registrasi. Tabel 7. menggambarkan persentase jenis kasus pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1, sedangkan Tabel 8. menggambarkan persentase penyelesaian kasus pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1.

Tabel 7. Kelompok Jenis Kasus Masa Ujian 2008.2 dan 2009.1

Uraian	2008.2		2009.1	
	Jml dan %		Jml dan %	
Total Kasus Administrasi	1,448		1,036	
Kasus 1 (UZ)	0	0,00		
Kasus 2 (UU)	138	9,53		
Kasus 3 (UV)	1,107	76,45	953	91,99
Kasus 4 (UW)	71	4,90	83	8,01
Kasus 5 (UY)	2	0,14		
Kasus 6 (UX)	75	5,18		
Kasus UT	55	3,80		

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009 dan Juli, 2009)

Tabel 8. Penyelesaian Kasus Sebelum Masa Registrasi Semester Berikutnya

Jenis Kasus	2008.2		2009.1	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Total Kasus	1448		1036	
Kasus 1 (UZ)	0	0		
Kasus 2 (UU)	0	0		
Kasus 3 (UV)	154	10,64	34	3,28
Kasus 4 (UW)	0	0	0	0
Kasus 5 (UY)	0	0		
Kasus 6 (UX)	0	0		
Kasus UT	0	0		
Sisa Kasus	1294		1002	

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, Maret 2009 dan Juli, 2009)

Data pada Tabel 8 menunjukkan bahwa sampai penutupan masa registrasi, persentase kasus nilai jenis kasus administrasi yang dapat diselesaikan adalah sekitar 11% pada masa registrasi 2008.2 dan 3% pada masa registrasi 2009.1. Dengan demikian tampak bahwa jumlah kasus yang belum terselesaikan masih tinggi yaitu mencapai 90% atau lebih. Kemungkinan rendahnya penyelesaian ini disebabkan oleh ciri dari sistem UT yang terbuka dan dilaksanakan secara jarak jauh (Suparman dan Zuhairi, 2004), sehingga mahasiswa UT memiliki latar belakang geografi dan sosio-ekonomi yang bervariasi dengan demikian ada kemungkinan informasi yang disampaikan tidak sampai pada mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa yang bersangkutan kurang memahami bagaimana cara menyelesaikan kasus yang dialaminya. Dengan demikian, tampaknya perlu mengaji lebih dalam tentang bagaimana penyampaian informasi kebijakan dan prosedur tentang penilaian ini dapat sampai kepada mahasiswa secara cepat dan tepat sesuai dengan hal yang disampaikan sesuai dengan pendapat Donan (2007) dan arahan dari University Teaching Services, The University of Manitoba (1993). Dengan adanya permasalahan yang masih belum selesai tersebut, target untuk melakukan proses hasil ujian secara tepat waktu untuk semua peserta ujian tanpa terkecuali (100% peserta ujian), seperti yang diisyaratkan Rudner (1994) dan Joint Committee on Testing Practices (2004) sampai dengan masa ujian 2009.1 tampaknya masih belum dapat dicapai dengan sempurna..

Karakteristik mahasiswa yang berkasus pada UAS masa ujian 2008.2 dan 2009.1 dikaji pada penelitian ini dengan melihat bagaimana tahun ijazah mahasiswa berkasus, bagaimana jenis kelaminnya, bagaimana pendidikan terakhir dari mahasiswa yang nilainya tidak diterbitkan, 10 mata kuliah apa saja yang paling banyak nilainya yang tidak terbit pada dua masa ujian tersebut, 10 program studi mana saja yang memiliki kasus tertinggi. Data tentang hal-hal tersebut di atas tercantum pada Tabel 8 sampai dengan Tabel 12.

Tabel 9. Persentase Kasus berdasarkan Lama Tahun Ijazah

Tahun Ijazah	% Jumlah Kasus	
	2008.2	2009.1
< 5 tahun	33,98	18,48
6 - 10 tahun	18,79	31,01
11 - 15 tahun	17,20	22,56
> 15 tahun	30,03	27,95

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, November 2009)

Dari Tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2008.2 persentase kasus terbesar berada pada tahun ijazah kurang dari 5 tahun, yaitu sebesar 33,98%. Sedangkan pada tahun 2009.1 persentase kasus terbesar ada pada tahun ijazah lebih dari 15 tahun, yaitu 27,95%. Apabila dilakukan evaluasi sulit untuk mengambil kesimpulan mengkaitkan antara kecenderungan lamanya tahun ijazah dengan persentase mahasiswa yang berkasus.

Berdasarkan Tabel 10, mahasiswa berkasus pada masa ujian 2008.2 adalah mahasiswa perempuan, yaitu sebesar 58,67% demikian pula pada masa ujian 2009.1 yang lebih tinggi terjadi juga pada mahasiswa perempuan, yaitu sebesar 62,95%. Namun, untuk menyimpulkan bahwa mahasiswa perempuan merupakan kategori mahasiswa yang banyak memiliki kasus tidak dapat dilakukan sehubungan dalam penelitian ini baru mengaji karakteristik mahasiswa berkasus untuk dua masa ujian saja, jumlah masa ujian yang tampaknya belum cukup dijadikan penunjang kesimpulan, dan yang kedua adalah penelitian ini tidak mengaji secara lebih mendalam tentang jumlah mahasiswa secara total dan jumlah mahasiswa yang mengalami jenis kasus lain.

Penjelasan yang disampaikan Juchnowski dan Atkins (1999) dan *Assessing Students Online* (1999) tentang kurangnya umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa, bervariasinya keterampilan mahasiswa, dan munculnya kecemasan pada saat ujian (walaupun yang disampaikan dalam konteks ujian online), perlulah dipertimbangkan untuk dikaji. Sehingga nanti diharapkan dapat diketahui apakah tahun ijazah yang mengindikasikan bahwa mahasiswa telah lamanya tidak terlibat dalam proses pembelajaran format, jenjang ijazah yang mungkin terkait dengan keterampilan yang dimiliki mahasiswa, dan jenis kelamin yang mungkin akan terkait dengan tingkat kecemasan yang dialami pada saat mengikuti ujian tersebut akan berhubungan dengan persentase kasus yang muncul. Selanjutnya, data pada Tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa pada dua masa ujian tersebut, mahasiswa perempuan yang berkasus mengalami kenaikan sedangkan mahasiswa laki-laki yang berkasus mengalami penurunan.

Tabel 10 Persentase Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin Mahasiswa Berkasus

Jenis Kelamin	2008.2	2009.1
Laki-Laki	41,33%	37,05%
Perempuan	58,67%	62,95%

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, November 2009)

Tabel 11 menunjukkan persentase kasus berdasarkan kategori pendidikan terakhir. Persentase mahasiswa berkasus yang memiliki latar belakang pendidikan S1, D1, dan D2 tampak lebih kecil dari mahasiswa yang berlatar belakang D3 dan SLTA. Evaluasi dari kecenderungan data ini belum dapat menghasilkan kesimpulan yang tegas, karena data menunjukkan bahwa persentase mahasiswa yang berlatar belakang D3 lebih besar dari yang berlatar belakang D2 dan D1. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik mungkin perlu mengadakan pengajian terhadap siapa saja yang termasuk mahasiswa berkasus yang memiliki jenjang pendidikan D3 dan melihat secara lebih mendalam tentang karakteristik mahasiswa berkasus yang berlatar belakang SLTA (misalnya dilihat dari tempat tinggal dan usia). Hal yang menarik dari data persentase kasus pada Tabel

11 tersebut adalah pada kedua masa ujian yang diteliti, persentase mahasiswa berkasus yang berlatar belakang ijazah SLTA dan D3 tampak konsisten, berada pada peringkat 1 dan 2, masing masing dengan besar persentase lebih dari 70% dan lebih dari 15%.

Tabel 11. Persentase Kasus Berdasarkan Kategori Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	2008.2 (%)	2009.1 (%)
SLTA	74,90	76,79
D1	2,98	1,67
D2	2,77	1,95
D3	16,57	18,01
S1	2,77	1,49

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, November 2009)

Beberapa mata kuliah mengalami kasus dapat dilihat pada tabel 12. Dari 10 mata kuliah terbanyak memiliki mahasiswa berkasus adalah pada masa ujian 2008.2 jumlah kasus untuk mata kuliah MKDU 4105 sebanyak 58 kasus atau 4,02%, sedangkan untuk masa ujian 2009.1 jumlah kasus terbanyak mata kuliah MKDU 4221, sebesar 2,32% (25 kasus). Dari hasil evaluasi tersebut, kesulitan untuk mengambil kesimpulan terhadap kecenderungan terulang kembali, walaupun ada beberapa mata kuliah yang tetap merupakan mata kuliha dengan persentase

Bila dilihat dari program studi (Tabel 13), maka jumlah kasus terbanyak pada masa ujian 2008.2 ada kecenderungan bahwa mahasiswa yang berkasus tersebut 16,02% (231 kasus) di ataranya tercatat pada program studi Manajemen-S1, sedangkan pada masa ujian 2009.1 tampaklah bahwa 17,55% dari mahasiswa berkasus tersebut (216 kasus) tercantan pada program studi Ilmu Administrasi Negara-S1. Dari hasil evaluasi terhadap data yang tercantum pada Tabel 12 tersebut belum cukup untuk menyatakan secara tegas bahwa mahasiswa dari program studi tertentu yang banyak mengalami kasus, argumentasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah kasus yang terjadi pada masa ujian 2008.2 dan 2009.1 fluktuatif, artinya setiap program studi mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kasus yang tidak terbaca polanya pada kedua masa ujian yang diteliti seperti tercantum pada Tabel 13.

Tabel 12. Daftar 10 MK dengan Persentase Kasus Tertinggi

No	2008.2	%	2009.1	%
1	MKDU4105	4,02	MKDU4221	2,32
2	MKDU4201	3,54	MKDU4110	2,14
3	MKDU4106	2,98	ISIP4110	2,04
4	MKDU4104	2,36	ISIP4212	2,04
5	ISIP4110	1,94	MKDU4111	2,04
6	MKDU4101	1,87	ISIP4112	1,49
7	EKMA4115	1,18	ISIP4130	1,39
8	EKMA4111	1,11	IDIK4008	1,30
9	ISIP4130	1,11	ISIP4213	1,30
10	PEMA4210	1,04	MKDU4109	1,30

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, November 2009)

Tabel 13. Daftar 10 Program Studi dengan Persentase Kasus Tertinggi

No	Masa Ujian 2008.2 Program Studi	%	Masa Ujian 2009.1 Program Studi	%
1	Manajemen-S1	16,02	Ilmu Administrasi Negara-S1	17,55
2	Ilmu Administrasi Negara-S1	14,98	Manajemen-S1	13,83
3	Ilmu Pemerintahan-S1	14,08	Ilmu Pemerintahan-S1	13,74
4	Pend, Bahasa & Sastra Indonesia-S1	6,10	Ilmu Komunikasi-S1	9,66
5	Ilmu Komunikasi-S1	5,89	Pend, Bahasa & Sastra Indonesia-S1	5,29
6	Pendidikan Matematika-S1	5,55	Ilmu Perpustakaan-D2	4,55
7	Pendidikan Bahasa Inggris-S1	5,34	Pendidikan Bahasa Inggris-S1	4,55
8	Pend, Pancasila & Kewarganegaraan -S1	4,30	Agribisnis: PKP Pertanian-S1	4,27
9	Ilmu Perpustakaan-D2	3,95	Pendidikan Fisika-S1	3,25
10	Pendidikan Biologi-S1	3,88	Pendidikan Matematika-S1	3,16

(Sumber Data: Bidang PHU, Pusat Pengujian, November 2009)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Berdasarkan analisis terhadap informasi dan dokumen yang terkait dengan karakteristik kasus, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis kasus yang menyebabkan tidak terbitnya hasil ujian atau nilai mahasiswa. Jenis kasus tersebut meliputi kasus matakuliah tidak ada di DNU, kasus nilai mata kuliah pada DNU bertanda (-), kasus karena belum adanya komponen nilai praktek/ Praktikum/PKM/ PKP (Kasus P), kasus mata kuliah tidak teregistrasi yang disebabkan oleh karena mahasiswa tidak registrasi atau data mata kuliah yang tercantum pada LJU/BJU tidak sesuai dengan yang data mata kuliah yang diregistrasikan (Kasus R), kasus kurang uang SPP yang disebabkan oleh karena pembayaran uang SPP kurang atau tidak jelas validasi pembayaran uangnya (Kasus S), dan kasus kesalahan administrasi ujian (Kasus A).

Karakteristik subjenis kasus dari kasus administrasi (Kasus A) yang merupakan penyebab tidak terbitnya nilai mahasiswa program Non Pendas pada masa ujian 2008.2 adalah Kasus 1 : LJU ada tetapi tidak ada daftar hadir, Kasus 2 : Tidak tanda tangan didaftar hadir, Kasus 3 : Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir, Kasus 4 : Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir, Kasus 5 : LJU tidak ada tetapi daftar hadir ada, dan Kasus 6: Tidak ada tandatangan di LJU/BJU. Karakteristik yang menyebabkan tidak terbitnya nilai hasil ujian mahasiswa pada masa ujian 2009.2 (setelah SK Rektor yang terbaru berlaku) adalah Kasus 3 : Beda tanda tangan di LJU dan daftar hadir dan Kasus 4 : Beda matakuliah antara LJU dan daftar hadir.

Persentase kasus yang dapat diselesaikan sebelum masa registrasi berikutnya yang masih dapat diselesaikan oleh bagian pemrosesan hasil ujian UT tampak masih rendah yaitu sekitar 11 % pada masa ujian 2008.2 dan 3% pada masa ujian 2009.1, walaupun UT Pusat segera setelah selesai pemrosesan hasil ujian mengirimkan surat kepada mahasiswa yang bersangkutan dan mengirimkan data digital ke UPBJJ-UT. Kemungkinan upaya tersebut belum efektif digunakan untuk menginformasikan kasus kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini sebaiknya mungkin perlu

mencari model untuk menginformasikan masalah kasus tersebut pada waktu setelah pemrosesan hasil ujian selesai dan sebelum masa penutupan registrasi berakhir.

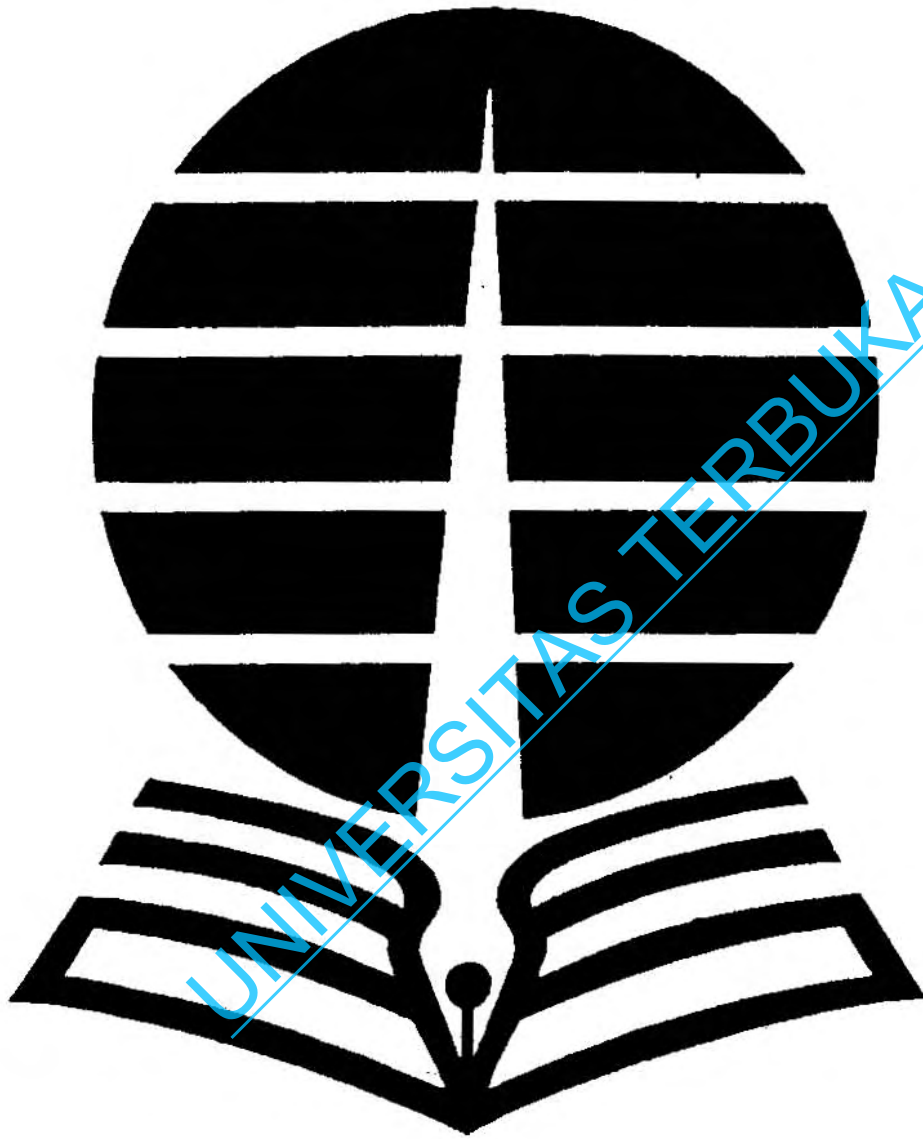
Karakteristik mahasiswa yang berkasus pada UAS masa ujian 2008.2 dan 2009.1 yang berupaya untuk diteliti adalah latar belakang ijazah, tahun ijazah, dan jenis kelamin serta mata kuliah dan program studi tempat mahasiswa berkasus berafiliasi. Walaupun dari hasil analisis data dapat diketahui tentang persentase mahasiswa perempuan yang berkasus yang cenderung lebih tinggi dari mahasiswa laki-laki yang berkasus, tahun ijazah yang menunjukkan kekurangkonsistenan data tentang kemana mahasiswa berkasus tersebut berada, latar belakang pendidikan yang menunjukkan bahwa mahasiswa berkasus cenderung yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA, dan data lainnya, namun kecenderungan data yang ditunjukkan tampaknya belum cukup untuk menyajikan kesimpulan tegas tentang hubungan mahasiswa berkasus dengan karakteristik tertentu.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan berdasarkan data dan kajian terhadap informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pertama, tampaknya perlu memberikan informasi kembali tentang kasus yang dihadapi mahasiswa dan cara penyelesaiannya pada saat mendekati waktu penutupan registrasi. Oleh karena Pusat Pengujian telah mengirimkan data digital tentang mahasiswa yang berkasus, maka dalam penyelesaian ini UPBJJ-UT terkait harus dilibatkan sebab jarak UPBJJ-UT dengan mahasiswa lebih dekat dan UPBJJ-UT tentunya lebih tahu tentang mahasiswa tersebut daripada Pusat Pengujian yang berkedudukan di UT Pusat. Kedua, perlu didiskusikan tentang berapa lama data kasus tersebut akan dipertahankan dan tindakan apa selanjutnya yang perlu dilakukan setelah batas waktu pemeliharaan tersebut dan hasil diskusi dapat dijadikan dasar untuk menyempurnakan kebijakan tentang penanganan kasus. Ketiga, tampaknya perlu ada penelitian lanjutan yang dapat mengungkap lebih jelas tentang penyebab kasus, hubungan kasus tersebut dengan karakteristik mahasiswa yang berkasus, dan dapat diperolehnya prototipe model untuk penyelesaian dan atau penanggulangan kasus tidak terbitnya hasil ujian yang terutama disebabkan oleh kasus administrasi. Terakhir, tampak perlu mencari model bukan hanya untuk menangani kasus secara berkelanjutan tetapi juga model untuk

mengantisipasi kasus. Pengembangan model untuk menangani kasus secara berkelanjutan perlu mempertimbangkan bahwa model tersebut tidak menimbulkan beban baru namun kasus mahasiswa dapat diselesaikan. Pengembangan model untuk mengantisipasi kasus perlu mempertimbangkan adanya bervariasi latar belakang geografi dan sosioekonomi mahasiswa UT.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Airasian, P. W. (1991). *Classroom Assessment*. New York: McGraw-Hill.
- Asia Pasific Knowledge Base on Open Distance Learning. (2004). Diambil tanggal 01 Februari 2006 dari <http://asipacific-odl.oum.edu.my/ODL/html/odl/topics/assessment.shtml>
- Assessing Students Online*. University of Newcastle (Australia). (1999). <http://www.newcastle.edu.au/discipline/sociolanthrop/staff/kibbymari/online/assess.html> dalam Kerka, S., Wonacott, M.E., Grossman, C, Wagner, J. (2000). *Assessing Learners Online*. Practitioner File. Diambil tanggal 24 April 2005 dari <http://ericacve.org/fulltext.asp>.
- Bull, J., Conole, G., Davis, H. C. & White, S. (2002). Rethinking assessment through learning technologies. In A. Williamson, C. Gunn & T. Clear (eds.) *Winds of change in the sea of learning. Proceedings of the 19th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary Education (ASCILITE)* (pp. 75-85). Auckland, New Zealand: ASCILITE.
- Collin, B. (1996). *Tele-learning in diiotal world: The future of distance learning*. London: International Thompson Computer Press.
- Daniel, J. (1996). *Mega university and knowledge media*. London: Kogan Page.
- Daniel, J. & Mackintosh, W. (2003). Leading ODL futures in eternal triangle: The mega university resposes to the greatest moral challenge of out age. In *Handbook of distance education*. (edited by Moore, M & Anderson, W). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Devi, P. (2006). *An ICT based distance education model: an evaluation of ICT-based modes at the niversity of the South Pacific*. (Thesis for Doctoral Program). Wellington: Victoria University of Wellington.
- Dietel, R.J., Herman, J.L. & Knuth, R.A. (1991) What Does Research Say about Assessment? *North Central Regional Educational Laboratory*, 1991. Diambil tanggal 12 Juli 2003 dari http://www.ncrel.org/sdrs/areas/stw_esys/4assess.htm
- Donan, P. (2007) Conducting assessment online: Educational developers' perspectives, in *Enhancing Higher Education. Theory and Scholarship, Proceedings of the 30th HERDSA Annual Conference [CD-ROM]*, Adelaide, 8-11 July
- Educational Testing Service. (2009). *Test center procedures and regulation*.
- Edwards, H. P.Govindaraju, K. & Lai, C. D. (2005). A control chart procedure for student grade monitoring. *Res. Lett. Inf. Math. Sci.*, 2005, Vol. 7, pp 117-126. Diambil tanggal 28 Januari 2009 dari <http://iims.massey.ac.nz/research/letters/>

- Gronlund, N.E. & Linn, R.L (1990). *Measurement and Evaluation in Testing*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Imel, S. (1996). Distance learning. myths and realities. *ERIC Digest* 1998. diambil tanggal 12 Januari 2007 dari <http://ericacve.org/docs/mr00012.htm>
- James, R., McInnis, C. & Devlin, M. (2002). *Assessing learning in Australian universities*. Diambil 27 Mei 2007 dari <http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning>.
- Joint Committee on Testing Practices (2004). *Code of Fair Testing Practices in Education..* Washington, DC: Joint Committee on Testing Practices.
- Juchnowski, M., and Atkins, P. (1999). *Online Assessment: Let's Do It*. Swinburne University of Technology, Australia.
- Katalog Universitas Terbuka. (2008). Jakarta: Universitas Terbuka
- Learning and Teaching Centre, Macquarie University (2008). *Interpreting and grading student learning: an overview*. Macquarie University staff attending the Learning and Teaching Forum: Assessing Learning, Communicating Standards, held in September 2008.
- Lockwood, F. (2001). Innovation in distributed learning: Creating the environment. In *Innovation in open and distance learning: Successful development of online and web-based learning*. Edited by Lockwood, F and Gooley, A. London: Kogan Page.
- Nipper, S. (1990). Third generation distance learning and computer conferencing. In *Mindweave: Commuiaction, computers and distance learning*. Edited by Mason, R. and Kaye, A. Oxford: Pergamon
- Pedoman Simintas, JKAK PU00. (2007). Jakarta: Universitas Terbuka
- Pedoman Simintas, JKOK UJ04. (2007). Jakarta: Universitas Terbuka
- Roeber, E. D. (1996). Guidelines for the development and management of performance assessments. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 5(7). Diambil tanggal 9 Februari 2007 dari <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=5&n=7>
- Rudner, L. M. (1994). Questions to ask when evaluating tests. *Practical Assessment, Research & Evaluation*, 4(2). Diambil tanggal 9 Februari 2007 dari <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=4&n=2>
- Sudrajat, A. *Penilaian hasil belajar*. Diambil tanggal 28 Januari 2008 dari <http://www.wordpress.com>

Suparman, A, & Zuhairi, A, (2004), *Pendidikan Jarak Jauh, Teori dan Praktek*, Edisi Kedua, Jakarta: Pusat Penerbitan, Universitas Terbuka.

Taylor, J. (1995). *Distance education technologies: Fourth generation distance education*. Diambil tanggal 12 Januari 2007 dari <http://www.usq.edu.au/users/taylorj/readings/4thgen.htm>

Taylor, J. (2001). Fifth generation distance education. In *Higher Education Series*. Canberra: Department of Education, Training, and Youht Affairs

Tim Penulis. (2004). *Pedoman Penilaian Hasil Evaluasi Hasil Belajar*. Jakarta: Universitas Terbuka

Tim Penulis. (2004). *Pedoman Pengelolaan penilaian Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Terbuka

Tim Penulis. (2004). *Pedoman Pengelolaan Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa*. Jakarta: Universitas Terbuka

University Teaching Services, The University of Manitoba (1993). *Grading : Suggestions for maximizing student's perceptions of fairness*, Manitoba : University Teaching Services, The University of Manitoba.

Wahyono, E. (2004), *Universitas Terbuka, Dulu, Kini, dan Esok*, Jakarta: Pusat Penerbitan, Universitas Terbuka

Personalia Penelitian

- Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dra. Isti Rokhiyah, M.A.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19620716 198801 2 001
- d. Bidang Ilmu : Pendidikan Biologi, Pendidikan IPA SD
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda/ III/c
- f. Jabatan fungsional : Lektor
- g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PMIPA
- h. Waktu penelitian : 8 jam / minggu

-Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : DR. Ir. Amalia Sapriati, M.A.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19600821 198601 2 001
- d. Bidang Ilmu : Pendidikan Biologi, Evaluasi Pendidikan
- e. Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
- f. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan/PMIPA
- h. Waktu penelitian : 6 jam / minggu

-Anggota Peneliti

- a. Nama Lengkap : Helmiatin, S.E.
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19780426 200212 2 003
- d. Bidang Ilmu : Manajemen
- e. Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/III/a
- f. Jabatan fungsional : -
- g. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi/Manajemen
- h. Waktu penelitian : 4 jam / minggu

- Tenaga Teknisi

- a. Nama Lengkap : Nanang Setiawan, S.Kom.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 19760310 200112 1 001
- d. Bidang Ilmu : Sistem Informasi
- e. Pangkat : Pengatur TK I / II/d
- f. Jabatan : -
- g. Unit : Pusat Pengujian LPBAUSI
- h. Waktu untuk Penelitian : 2 jam/minggu